

BAB III

PEMBAHASAN

Perubahan Sosial menurut Soemarjan dalam (Martono, 2012: 4) adalah segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Warmon Kokoda pasca Tiga tahun terbentuk menjadi sebuah desa baru, memang bukanlah perubahan yang terjadi secara signifikan. Melihat Wamon Kokoda dengan kaca mata universal akan susah mengatakan bahwa sedikit demi sedikit masyarakat Warmon kokoda telah mengalami perubahan.

Melalui teori dimensi perubahan sosial yang dikemukakan oleh Himes dan Moore penulis mencoba mengkaji perubahan sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Warmon Kokoda. Menurut Himes dan Moore (dalam Soelaiman dalam Martono, 2012: 6) perubahan sosial memiliki 3 dimensi yaitu, dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interakasional.

A. Hasil Temuan Lapangan :

Berikut merupakan hasil temuan lapangan yang penulis temukan dalam melakukan penelitian :

1. Dimensi Struktural

Perubahan sosial masyarakat dilihat dari dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, peranan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan tersebut mencakup: bertambah dan berkurangnya kadar peranan, aspek perilaku dan kekuasaan, adanya penningkatan atau penurunan sejumlah peranan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan, dan terjadinya perubahan sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat perubahan struktur.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Warmon Kokoda berdasarkan dimensi struktural antara lain:

a) Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki peradaban manusia. Tanpa pendidikan manusia akan tertinggal dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Pendidikan juga merupakan salah satu institusi penting dalam proses perubahan sosial.

1) Pra Pembentukan Desa

Berbicara tentang pendidikan, sebagai salah satu desa yang berada di lingkungan dikelilingi oleh para transmigran dari Jawa kondisi pendidikan di Desa Warmon Kokoda cukup memprihatinkan. Jika

dibandingkan dengan masyarakat transmigran Jawa, masyarakat Suku Kokoda masih sangat tertinggal.

Jumlah anak usia sekolah di Warmon Kokoda kurang lebih mencapai 112 anak. Dengan komposisi, anak usia sekolah SD sebanyak 81 anak, anak usia sekolah SMP sebanyak 21 anak, dan anak usia sekolah SMA sebanyak 10 anak. Dari total keseluruhan anak usia sekolah yang bersekolah ada kurang lebih 50 anak yang terdaftar sebagai siswa di Labschool Desa Warmon Kokoda, 5 anak yang bersekolah di sekolah SD di Kelurahan Makbusun dan sisanya bersekolah. Untuk anak usia sekolah SMP ada 15 anak yang bersekolah, dan untuk usia SMA ada 5 orang yang bersekolah.

Di Desa Warmon Kokoda sebenarnya sudah ada sekolah SD, namun kualitas pendidikan dengan fasilitator (guru) yang berjumlah hanya satu orang, pun tidak setiap hari mengajar membuat anak-anak malas untuk belajar. Hal ini diperparah dengan sikap ketidakpedulian dan acuh tak acuhnya orang tua terhadap pendidikan sang anak.

Pada usia dini anak-anak sudah banyak yang bekerja, pergi ke hutan, mencari kangkung, dan bahkan tak jarang dari mereka mencuri hasil kebun milik warga transmigran Jawa. Hal inilah yang kerap memicu konflik antara masyarakat transmigran Jawa dengan masyarakat Warmon Kokoda.

Menurut transmigran Jawa, selama masyarakat Warmon Kokoda masih hidup dalam satu kelompok secara bersama-sama, maka watak dan

pola pikirnya tidak akan pernah berubah. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber 3 :

“...kalau anak-anak mereka masih hidup bersama orang tua mereka dalam satu kelompok seperti itu perilaku dan watak masyarakatnya tidak akan berubah. Seharusnya anak-anaknya di buang ke Jawa atau dimanapun yang penting dipisahkan dari kelompoknya...”

2) Pasca Pembentukan Desa

Pada tahun 2018 pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk keperluan pendidikan anak-anak di Desa Warmon Kokoda. Anggaran ini digunakan untuk membiayai anak-anak yang ingin belajar atau sekolah baik di Sorong sendiri ataupun yang di luar Sorong. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat orang tua agar peduli terhadap pendidikan sang anak. Pernyataan tersebut berdasarkan Wawancara dengan narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“... pemerintah desa mengalokasikan dana untuk keperluan pendidikan, agar mendorong masyarakat untuk peduli terhadap sekolah anak-anak”

Kemudian pada pertengahan 2019, Kepala Desa Warmon Kokoda Samsudin Namugur bersama Ketua RT 02 Samir Kuya, mendorong beberapa anak-anak Warmon Kokoda untuk menempuh pendidikan di tanah Jawa. Mereka mengantar beberapa anak yang memiliki semangat belajar tinggi ke beberapa instansi pendidikan di Jawa, ada yang di

Sekolah SD, SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan wawancara bersama narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“... ada kurang lebih sepuluh anak yang kami antar untuk sekolah di Jawa, ada yang di Madiun, Magetan, dan ada juga yang di Jogja.”

Dari sepuluh anak yang menempuh pendidikan di pulau jawa ada 5 anak usia SD, ada 3 anak usia SMP, ada 1 anak usia SMA, dan 1 anak yang melanjutkan di perguruan tinggi negeri.

Dari data saat wawancara dengan narasumber 6, dari kurang lebih 10-15 anak yang sering berangkat ke sekolah, kini mengalami peningkatan kurang lebih 25-30 anak yang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“.... Sekarang sudah banyak yang berangkat sekolah, tidak seperti dulu cuma 10-15 orang saja, sekarang sudah mencapai 25-30 setiap harinya.”

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan semangat belajar anak-anak serta orang tua yang sudah mulai peduli terhadap pendidikan anaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Warmon Kokoda dalam segi pendidikan telah memperbaiki diri kearah yang lebih baik. Meskipun perubahan yang

terjadi tidak signifikan, tapi hal ini memicu dan memotivasi masyarakat yang lain agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik.

b) Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan kegiatan manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana tiap-tiap daerah memiliki perbedaan sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Mata pencaharian dibedakan menjadi dua, yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan aktifitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian pokok. Berikut adalah hasil temuan perubahan kondisi sosial masyarakat pada mata pencahariannya :

1) Pra Pembentukan Desa

Masyarakat Warmon Kokoda merupakan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan perekonomian. Mata pencaharian mereka yang belum tetap membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mayoritas dari mereka masih mengandalkan hasil alam seperti sagu yang diambil dari hutan, sayuran

yang tumbuh tanpa harus ditanam seperti kangkung dan genjer. Hanya beberapa penduduk yang memiliki pekerjaan tetap dan yang mulai berjualan dirumah untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Hasil alam merupakan kebutuhan yang suatu saat akan habis, sehingga jika tidak diolah atau didaur ulang maka tidak akan menyisakan untuk generasi berikutnya.

2) Pasca Pembentukan Desa

Menurut Setiawan (dalam Nensy Lusida, 2017: 29) pembentukan desa berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan.

Pasca pembentukan desa masyarakat yang dulunya tidak memiliki pekerjaan tetap, kini diantaranya memiliki pekerjaan tetap. Memang bukan keseluruhan, tapi setidaknya pasca pembentukan desa angka pengangguran mulai menurun.

Pada dasarnya masyarakat Wamon Kokoda adalah masyarakat yang dulunya hidup di pesisir, selain menggantungkan hidupnya pada hutan, mereka juga menggantungkan hidupnya pada laut. Tahun 2018 pemerintah desa menggunakan anggaran dana desa membuat sebuah kapal yang di gunakan dan dikelola oleh masyarakat secara kolektif. Masyarakat yang dulunya tidak memiliki pekerjaan bisa ikut serta dalam kelompok nelayan, dan mempergunakan kapal tersebut secara bersama-sama.

Pernyataan ini berdasarkan wawancara bersama narasumber 1 pada 25

Agustus 2019 :

“... sekarang kita sudah memiliki kapal yang digunakan dan dikelola secara kolektif, jadi masyarakat yang masih ngaggur bisa ikut menjadi nelayan.”

Selain menjadi nelayan, kini masyarakat khususnya mama-mama juga sudah mulai membuka usaha dengan berjualan makanan di depan rumah mereka. Dengan modal pinjaman dari BUMDES mereka membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. dan terkadang yang laki-laki juga ikut menjadi tukang ketika ada proyek pembangunan yang ada di desa. Hal ini juga berdasarkan pernyataan narasumber 1 pada 25 Agustus 2019 :

“mama-mama sekarang dengan pinjaman BUMDES ada yang buka usaha. Dan bapak-bapak serta pemuda-pemuda kalo ada proyek pembangunan di desa mereka ikut menjadi tukang.”

Beberapa masyarakat juga diangkat menjadi aparatur desa, dan bekerja untuk keperluan-keperluan desa.

Berikut adalah komposisi mata pencaharian masyarakat berdasarkan hasil temuan penulis.

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	20 Orang

2	Aparatur Desa	15 Orang
3	Usaha Warung Kecil	5 Orang
4	Guru	2 Orang
5	Pekerja Proyek	15 Orang

Sumber : Wawancara Dengan Kepala Desa

Pasca pembentukan desa kini angka pengangguran pada masyarakat Desa Warmon Kokoda mulai menurun. Meskipun tidak terjadi pada skala yang besar, namun ini menunjukkan perubahan yang lebih baik.

c) Jumlah Penduduk

Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada perjalanannya sebagai sebuah desa, Warmon Kokoda mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup drastis, berikut adalah hasil temuan penulis terkait dengan jumlah penduduk Warmon Kokoda sebelum dan sesudah pembentukan desa.

1) Pra Pembentukan

Sebagai sebuah desa, Warmon Kokoda merupakan sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk tidak banyak. Pada awal terbentuknya menjadi sebuah desa, Warmon Kokoda hanya memiliki jumlah KK 158,

dengan jumlah penduduk 256 jiwa (*Sumber data : skripsi Nensy Lusida*) yang didominasi oleh jumlah anak-anak. Setiap keluarga di desa biasanya memiliki anak rata-rata 3-5 anak. Akan tetapi dari sekian jumlah penduduk tersebut, ada beberapa yang belum menetap di desa, masih ada yang sering bolak-balik dari desa ke kota, ataupun dari kota ke desa untuk urusan pekerjaan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“...dulu awal terbentuk desa di Warmon Kokoda ada 158 KK, dengan jumlah penduduk kurang lebih 256 jiwa, namun masih ada yang pulang pergi untuk kerja.”

Namun dari sekian banyak masyarakat yang terdata sebagai penduduk Warmon Kokoda, masih banyak masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan yaitu KTP. Belum dimilikinya KTP atau identitas kependudukan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan hak-hak sipil, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

2) Pasca Pembentukan Desa

Sejak disahkannya Warmon Kokoda sebagai desa, jumlah penduduk semakin bertambah banyak. Penduduk yang datang merupakan penduduk asli Suku Kokoda juga yang dahulunya tinggal di kota, tepatnya di perkampungan Suku Kokoda Rufe Surya. Berpindah mereka dari kota ke desa merupakan karena mereka menganggap bahwa setelah

terbentuk menjadi desa Warmon Kokoda mampu untuk menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Dari tahun 2016 yang penduduknya hanya mencapai 256 jiwa dengan KK berjumlah 158 KK, kini penduduk Warmon Kokoda telah mencapai 600 jiwa dengan KK berjumlah 180 KK. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber 1 melalui wawancara pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“... sekarang penduduk Warmon Kokoda bertambah banyak, dari KK yang berjumlah 158 KK dengan penduduk 256 jiwa, kini telah menjadi 180 KK dengan jumlah penduduk kurang lebih 600 jiwa”.

Bertambahnya jumlah penduduk Warmon Kokoda bukan tidak mungkin menjadi masalah baru bagi pemerintah desa. Bertambahnya jumlah penduduk bisa menjadi konflik horizontal antar sesama masyarakat kokoda. Terlebih kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibawa oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat kota yang bisa membawa pengaruh pada masyarakat Warmon Kokoda yang telah sudah mulai adaptif hidup berdampingan bersama warga transmigran.

Namun di luar daripada itu kini masyarakat yang dulu tidak memiliki identitas berupa KTP, kini banyak dari mereka telah memiliki KTP. Selain KTP masyarakat kini juga ada beberapa yang telah memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS, kurang lebih 10 orang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber 1 pada tanggal 25 Desember 2019:

“... sekarang sekitar 70% masyarakat sudah memiliki KTP, dan kuranglebih 10 masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS”

d) Struktur Kelembagaan

Dalam dimensi struktural salah satu perubahan sosial yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan ditekankan pada aturan main dan kegiatan kolektif untuk mencapai kepentingan bersama. Menurut Ostrom (dalam Setiowati 2007) rambu-rambu atau aturan sebagai aturan yang dipakai oleh anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat satu sama lain. Sementara menurut Uphoff (dalam Setiowati 2007) lembaga didefinisikan sebagai suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang menjadi nilai bersama.

1) Pra Pembentukan Desa

Desa Warmon Kokoda dahulunya secara definitive merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Makbusun. Sebagai bagian dari wilayah Kelurahan Makbusun Warmon Kokoda mendapatkan status sebagai bagian dari RT di Makbusun, yaitu RT 06/RW 01.

Sebelum pembentukan desa Warmon Kokoda tidak memiliki struktur kelembagaan yang mampu secara kolektif untuk melayani seluruh masyarakatnya. Kalaupun ada saat itu secara formil hanya ada RT yang menaungi seluruh anggota masyarakat Warmon Kokoda. Pada saat itu

yang menjadi Ketua RT 06 adalah bapak Zakaria. Informasi ini kami peroleh dari narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“secara kelembagaan, dulu kita hanya ada Ketua RT tidak ada lembaga-lembaga lain di bidang pemerintahan. Ketua RT pada saat itu adalah Bapak Zakaria.

Dalam bidang yang lain, misalnya dalam kelembagaan adat, masyarakat Warmon Kokoda juga tidak memiliki kelembagaan yang memiliki struktur dan turunan-turunan dibawahnya. Masyarakat hanya mengenal raja sebagai pimpinan masyarakat. Keterangan ini didapatkan dari narasumber 1 dan dikuatkan oleh narasumber 4 yang mengatakan bahwa:

“untuk kelembagaan adat disini tidak memiliki struktur, kami hanya memiliki raja sebagai pimpinan-pimpinan kami”.

Dari hasil temuan lapangan ini dapat dilihat bahwa masyarakat Warmon Kokoda baik secara pemerintahan ataupun adat, belum memiliki struktur kelembagaan yang secara kolektif menaungi seluruh masyarakat Warmon Kokoda.

2) Pasca Pembentukan Desa

Akhir tahun 2015 Warmon Kokoda disahkan sebagai secara sah sebagai desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Dan pada tanggal 12 Desember 2015 dilantiklah Syamsudin Namugur sebagai Kepala Desa Warmon Kokoda. Pasca pembentukan Desa kini Warmon Kokoda memiliki struktur kelembagaan yang menaungi masyarakatnya.

Berikut adalah struktur kelembagaan masyarakat di bidang Pemerintahan Desa.

Tabel 3.2 Struktur Pemerintah Desa Warmon Kokoda

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Ari Syamsuddin	Kepala Desa	L	28 Thn	S1
	Namugur				
	Ariyanto Bebaur	Staff	L	29 Thn	SMA
2	Samsudin Atune	Sekretaris Desa	L	38 Thn	SMA
	Junaidin Ere				
	Junaidin Ere	Staff	L	23 Thn	SMA
3	Kamal Kasira	Bendahara	L	37 Thn	S1
	Suriyanto Namugur				
	Suriyanto Namugur	Staff	L	19 Thn	SMA
4	Muhammad Kasira	Kepala Urusan Pemerintahan	L	27 Thn	SD
	Latif Namugur				
	Latif Namugur	Staff	L	28 Thn	SMA
5	Kamsila Kasira	Kepala Urusan Kesra	P	38 Thn	SD
	Kahrudin Edoba				
	Kahrudin Edoba	Staff	L	24 Thn	SMA
6	Karim Toriga	Kepala Urusan Pembangunan	L	39 Thn	SD

	Syafii Kuya	Staff	L	24 Thn	SMA
7	Arman Kuya	Kepala Urusan Umum	L	35 Thn	SD
	Irwan Namugur	Staff	L	24 Thn	SMA

Sumber : Pemerintah Desa Warmon Kokoda

Tabel 3.3 Struktur Badan Musyawarah Desa Warmon Kokoda

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Zakaria Namugur	Ketua	L	68 Thn	SD
2	Jafar Bauw	Sekretaris	L	45 Thn	SMP
3	Daiy Atune	Anggota	L	47 Thn	SMP
4	Maulana Edoba	Anggota	L	34 Thn	SD
5	Muti Gogoba	Anggota	L	38 Thn	SD

Sumber: Pemerintah Desa Warmon Kokoda

Tabel 3.4 Ketua RT dan RW Desa Warmon Kokoda

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Jalil Namugur	Ketua RT 01	L	38 Thn	S1
2	Samir Kuya	Ketua RT 02	L	37 Thn	S1
3	Tarawi Atune	Ketua RW 01	L	43 Thn	S1

Sumber: Pemerintah Desa Warmon Kokoda

e) Status dan Peran

Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. menurut Soekanto (1999: 243) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Menurut Himes dan Moore (dalam Soelaiman, 1998) perubahan sosial pada dimensi struktural mempunyai keterkaitan yang erat dengan perubahan peran dalam masyarakat. Berikut merupakan perubahan peran yang terjadi dalam masyarakat Warmon Kokoda.

1) Pra Pembentukan

Suku Kokoda menjalani hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan masyarakat warmon kokoda berasal dari masyarakat kokoda yang awalnya hidup di kota

kemudian pindah ke Satuan Pemukiman (SP 3). SP merupakan wilayah yang didominasi oleh penduduk transmigran. Hingga beberapa diantaranya sudah ada yang menetap namun beberapa diantaranya masih ada yang berpindah-pindah.

Dulunya mereka hanya sebuah komunitas masyarakat adat yang tinggal di wilayah SP, dan seiring berjalannya waktu mereka bergabung ke Kelurahan Makbusun dan dibentuk RT yaitu RT 06 atau masyarakat umum sering menyebutnya RT Kokoda dan Ketua RT bernama Zakaria Namugur.

Sebagai komunitas masyarakat adat mereka memiliki pimpinan kelompok. Pimpinan tersebut yaitu seorang raja yang memiliki peran dalam mengurus masalah-masalah adat, masalah antar individu, ataupun masalah dengan warga transmigran. Para raja memiliki peran dalam memediasi masalah-maslah yang terjadi di masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber 4 :

“... dulu kita pernah punya masalah dengan masyarakat jawa di depan, dan kita sebagai tetua yang menjadi penghubung untuk menyelesaikan masalah”.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa seorang raja memiliki peran yang besar dalam penyelesaian setiap masalah yang ada di masyarakat.

Selain dalam penyelesaian masalah, raja juga memiliki peran paling penting dalam menjalankan urusan adat atau kegiatan yang berkaitan dengan adat. Semisal dalam menjalankan sebuah upacara adat yaitu Sasi Adat.

Sasi adat adalah salah satu adat Suku Kokoda yang memiliki arti yang cukup sakral dan masih dipercaya hingga saat ini. Sasi adat Suku kokoda dikenal dengan sebutan kera-kera yang dapat dilakukan jika salah satu diantara mereka terjatuh secara tidak sengaja sehingga harus melakukan sasi adat dengan penanaman kayu atau tiang yang dilakukan oleh saudara perempuan dari orang tersebut. Mereka meyakini bahwa tiang yang sudah ditanamkan harus dicabut secara resmi menggunakan prosesi adat. Jika tiang tersebut tidak dilakukan sesuai prosesi adat, maka orang yang terjatuh akan tertimpa musibah. Rangkaian acara sasi adat ini diiringi dengan goyang panta selama sehari semalam dan disambung dengan acara adat baku gigit. Baku gigit hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya memiliki kemampuan lebih seperti keturunan raja karena dalam gigitannya telah diberikan beberapa doa atau mantra. Mereka juga meyakini siapapun yang digigit akan memperoleh keberanian serta kekuatan dalam berperang atau berkelahi. Acara dilanjutkan dengan pencabutan tiang sasi adat diiringi dengan tarian goyang panta. Tiang sasi akan dibawa kerumah pihak saudara perempuan yang akan ditukarkan dengan beberapa harta seperti piring gantung, dan barang adat lainnya. Pencabutan tiang sasi memiliki arti bahwa telah hilang seluruh hutang

yang pernah dilakukan oleh orang yang jatuh tersebut. Acara adat akan ditutup dengan makan bersama seluruh masyarakat yang ada didesa.

Dalam pelaksanaan upacara tersebut dipimpin secara langsung oleh raja yang ada di Desa Warmon Kokoda.

2) Pasca Pembentukan

Masyarakat Warmon Kokoda kini telah menjadi entitas yang berdiri sendiri yaitu sebagai masyarakat desa yang secara legal formal telah diakui oleh negara. Disahkannya Warmon Kokoda sebagai desa memunculkan peranan-peranan baru dalam struktur pimpinan masyarakat. Raja-raja yang dulunya menjadi pucuk pimpinan masyarakat kini tidak lagi menjadi pimpinan utama dalam masyarakat. Dalam beberapa urusan yang berkaitan dengan adat ataupun masyarakat yang dulunya diputuskan oleh raja-raja, kini ada Kepala Desa yang juga turut ambil bagian dalam hal itu. Pernyataan ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber 1 pada tanggal 25 Desember 2019.

“... kepala desa mempunyai andil dalam mengambil keputusan dalam urusan adat ataupun urusan masyarakat”.

Tidak hanya dalam pengambilan keputusan, kepala desa juga memiliki peran dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi antara masyarakat sesama ataupun dengan masyarakat transmigran. Seperti contoh pada sebuah kejadian di tahun 2017, ketika ada seorang warga dari Warmon Kokoda yang ingin mencuri ikan dari kolam transmigran Jawa

yang menimbulkan konflik cukup besar antara warga transmigran Jawa dengan masyarakat Warmon Kokoda. Akhirnya kepala desalah yang menjadi mediator bersama pimpinan warga transmigran Jawa untuk menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2010:

“...waktu itu saya coba tenangkan masyarakat dan saya mewakili masyarakat Warmon Kokoda untuk meminta maaf kepada warga transmigran Jawa. Alhamdulillah konfliknya bisa diredam.”

Hal ini diperkuat diperkuat dengan hasil obrolan bersama Kepala RW 01, Jono Suwarno dengan beberapa masyarakat transmigran Jawa :

“...kalau waktu itu Kepala Desa tidak turun mungkin kami sudah perang dengan orang-orang Kokoda. Untungnya waktu itu pak desa mewakili masyarakatnya untuk meminta maaf pada kami”.

Ini menunjukkan bahwa peran-peran dalam hal kepemimpinan sudah mulai bergeser dimana dulu setiap permasalahan, bapa raja sebagai tetua adat adalah pengambil keputusan serta mediator untuk masyarakat Warmon Kokoda, sekarang kepala desalah yang memiliki peran tersebut. Selain penyelesaian masalah, acara-acara adat juga perlu kehadiran kepala desa dalam berlangsungnya acara. Misalnya pada saat upacara sasi adat tahun 2017, acara sasi adat sempat ditunda beberapa waktu karena menunggu kehadiran kepala desa yang saat itu sedang bepergian.

2. Dimensi Kultural

Dimensi Kultural mengacu pada perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Dimensi ini memungkinkan terjadinya inovasi kebudayaan misalnya ditandai dengan munculnya teknologi baru, sehingga kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berpikir kreatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan hal ini juga berpengaruh terhadap gaya hidupnya. Kemudian terjadinya difusi. Difusi merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapatkan pengaruh dari budaya lain, yang hal tersebut kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang menerima unsur-unsur budaya tersebut. Selanjutnya terjadinya integrasi, yang disebabkan dalam proses ini terjadi unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan yang saling bertemu dan memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Warmon Kokoda dari dimensi kultural antara lain :

a) Gaya Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gaya hidup adalah tingkah laku sehari-hari sekelompok manusia dalam masyarakat. Gaya hidup bisa jadi merupakan identitas suatu kelompok. Gaya hidup setiap kelompok akan memiliki ciri-ciri tersendiri. Jika terjadi perubahan gaya hidup suatu kelompok, akan memberikan dampak pada pola perilaku masyarakatnya.

1) Pra Pembentukan Desa

Selain masyarakat yang nomaden atau masyarakat yang berpindah-pindah, masyarakat kokoda adalah masyarakat yang hidup secara komunal dan bekerja secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Mereka tinggal dalam suatu rumah panggung dengan ukuran yang besar dan dihuni oleh beberapa keluarga.

Rumah tersebut dinamai mereka dengan rumah gaba-gaba. Dinding dan lantai rumah tersebut terbuat dari susunan batang daun sagu yang disusun rapat hingga menutup bagian dalam rumah, sedangkan atapnya terbuat dari daun pohon sagu yang dianyam rapat hingga bisa digunakan untuk melindungi dari terik matahari serta air hujan. Dalam satu rumah gaba-gaba biasa tinggal 3-5 keluarga yang tinggal secara bersama-sama, baik satu hubungan darah ataupun satu hubungan dalam anggota marga. Hal ini berdasarkan obrolan bersama narasumber 2 ketika penulis sedang menjalankan kegiatan KKN disana :

“... dulu kita hidup tinggal di rumah panggung yang terbuat dari gaba-gaba dan hidup secara bersama-sama dengan beberapa keluarga dalam satu rumah.”

Aktivitas yang sering dilakukan secara bersama-sama dalam satu rumah membuat keakraban serta kekeluargaan terjalin begitu kuat. Satu rumah yang diisi oleh anggota keluarga yang besar membuat pekerjaan rumah bisa dijalankan secara kolektif. Semisal untuk mencari sagu, mereka bisa berangkat hutan bersama-sama. Berbagi tugas dalam

memotong pohon sagu, tokok sagu, hingga makanan itu tersaji dan siap untuk disantap. Kebutuhan-kebutuhan rumah juga ditanggung bersama-sama oleh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut, seperti kebutuhan air, litrik, dan kebutuhan lainnya. Ini juga berdasarkan hasil obrolan bersama narasumber 2 ketika penulis sedang melaksanakan KKN disana :

“... dalam satu rumah yang ditinggali beberapa keluarga, kita bisa saling berbagi tugas untuk memenuhi kebutuhan rumah.”

Dalam kejadian ini kita bisa melihat bahwa masyarakat kokoda dulunya memiliki gaya hidup yang komunal, hidup secara bersama-sama dan memnuhi kebutuhan hidupnya secara kolektif.

Gambar 3.1



Kondisi Rumah Masyarakat Warmon Kokoda Sebelum Dibangun Rumah Baru.Sumber: Dokumentasi TIM KKN MBN-Papua

2) Pasca Pembentukan Desa

Pada tahun 2016, masyarakat Desa Warmon Kokoda mendapatkan bantuan pembangunan perumahan dari Dinas Sosial Kabupaten Sorong. Perumahan tersebut terbuat dari beton cor dan berbentuk seperti perumahan-perumahan pada umumnya. Perumahan tersebut terdiri dari kurang lebih 57 bangunan.

Semenjak didirikan perumahan tersebut, masyarakat mulai tinggal dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Satu rumah bisa terdiri dari 1-3 anggota keluarga. Anggota-anggota keluarga yang kini mulai hidup sendiri dalam rumah masing-masing mengurus keperluan dan kebutuhannya sendiri-sendiri dan tidak kolektif lagi.

Dahulu warga bebas memasuki rumah siapapun untuk melakukan kontak sosial dengan penghuni rumah. Sekarang rumah menjadi suatu privasi yang harus dijaga dan tidak bisa sebebasnya orang keluar masuk. Hal ini menyebabkan kontak sosial diantara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya semakin berkurang. Selain itu, kepemilikan rumah secara pribadi menyebabkan sikap individualis. Informasi ini diperoleh dari hasil obrolan bersama narasumber 2, berikut informasinya:

“...sekarang masyarakat sudah memiliki rumah sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri, dan mengurus urusannya sendiri.”

Dari informasi ini kita dapat melihat bahwa masyarakat Warmon Kokoda yang dulunya hidup secara komunal dan bekerja secara kolektif, kini berubah gaya hidupnya menjadi individualis dimana hubungan-hubungan keakraban dan kekeluargaan tak seerat dahulu.

Gambar 3.2



Kondisi Rumah Masyarakat Warmon Kokoda Yang Baru. Sumber: Dokumentasi TIM KKN MBN-Papua.

b) Pola Pikir

Pola pikir adalah cara akal dan otak manusia dalam menerima, memproses, menganalisis, mempersepsi dan membuat kesimpulan terhadap informasi yang masuk melalui indra (M. Yunus, 2014: 38). Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia pola pikir adalah sebuah sistem atau cara kerja yang diatur oleh otak kemudian disimpan oleh otak dan disebarkan ke seluruh tubuh sebagai acuan dalam bertindak dan sebagai pembentukan karakter. Menurut Gunawan (2010) pola pikir adalah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, atau cara berfikir yang menentukan pandangan dan perilaku, sikap seseorang. Pola pikir dapat mengubah pandangan individu mengenai suatu hal. Perubahan pola pikir tentunya disebabkan adanya kontak dengan luar, adanya sikap terbuka serta adanya akses untuk memperoleh informasi baru (Martono, 2012: 27). Pola pikir masyarakat Desa Warmon Kokoda pasca pembentukan desa mengalami perubahan, berikut adalah penjelasannya:

1) Pra Pembentukan Desa

Masyarakat Kokoda adalah masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya dari hasil alam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka pergi ke hutan mencari sagu, ikan, serta jenis makanan lainnya dengan cara-cara yang telah mereka pelajari dari sudah sejak jaman dulu.

Dengan begitu mereka beranggapan bahwa pendidikan, pekerjaan dan bertani tidaklah penting, sebab apa yang menjadi kebutuhan hidup

mereka sudah mereka dapatkan dari hasil alam. Meskipun tak jarang hasil alam yang mereka peroleh bukan dari hutan, tapi dari hasil kebun milik warga transmigran.

Pola pikir inilah yang kemudian membentuk pola hidup mereka untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Informasi ini diperoleh dari hasil obrolan dengan narasumber 4 pada saat penulis KKN disana :

“...masyarakat kami sangat menggantungkan hidupnya dari alam. Semua jenis makanan kita bisa dapatkan dari hutan. Sagu, buah-buahan, ikan, pinang, semua bisa kita dapatkan di hutan.”

Namun seiring berjalannya waktu kondisi hutan yang dulunya menghidupi mereka perlahan mulai susah untuk memenuhi kebutuhan. Adanya proyek pembangunan jalan, penebangan hutan untuk dijadikan kebun, mempersempit hutan mereka. Terlebih, tanah/hutan tempat mereka mencari kebutuhan hidup bukan tanah milik suku mereka sendiri, melainkan milik suku moi, dimana dalam proses untuk pengambilan hasil alam diperlukan upacara-upacara adat untuk seserahan serta ada harta yang harus dibayar dengan berbagai jenis ketentuan. Informasi dari hasil obrolan bersama narasumber 4 :

“... tanah kami di Kokoda bukan disini. Tanah ini milik tuan tanah yaitu Suku Moi. Jadi kalau kita ingin mengambil hasil hutan harus ada upacara adat dan seserahan.”

Hasil hutan yang semakin terbatas memaksa mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sehingga beberapa

diantaranya memilih untuk mencari pekerjaan seperti masyarakat di sekitarnya.

2) Pasca Pembentukan Desa

Akhir tahun 2016, Warmon Kokoda disahkan menjadi sebuah entitas yang berdiri sendiri sebagai desa. Pasca disahkannya sebagai desa, Warmon Kokoda menjadi salah satu daerah prioritas untuk pembangunan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini didukung dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Sorong yang memberikan bantuan dengan pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan pada tahun 2016 dan ditempati masyarakat pada tahun 2017.

Disahkannya Warmon Kokoda sebagai desa mengundang perhatian banyak organisasi-organisasi sosial untuk datang memberikan bantuan-bantuan seperti misalnya sembako, hewan qurban, pakaian layak pakai, buku-buku bacaan, serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“... setelah disahkan menjadi sebuah desa, Warmon Kokoda sering mendapatkan bantuan dari pemerintah, juga dari beberapa organisasi sosial baik organisasi-organisasi kampus atau komunitas-komunitas di Sorong.”

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan dari narasumber 3 :

“... iya benar, setelah disahkan menjadi desa masyarakat sering mendapatkan bantuan. Pernah juga mendapatkan bantuan dari

TNI, yang paling banyak mereka mendapatkan bantuan ketika Idul Adha, biasanya sampai lebih dari 5 ekor sapi.”

Tujuan dari pemberian yang diberikan untuk masyarakat Kokoda memang sangatlah bagus. Bantuan tersebut merupakan bagian dari empati melihat kondisi masyarakat Kokoda yang memang sedikit kurang dibanding kondisi masyarakat lain di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi pola-pola bantuan yang diberikan justru semakin lama semakin membuat masyarakat mempunyai pola pikir untuk selalu menerima bahkan lebih parahnya ini menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan pada bantuan-bantuan tersebut.

c) Budaya Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (1993: 9) budaya berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu ide, aktifitas, dan benda-benda hasil karya manusia.

1) Pra Pembentukan Desa

Sebelum pembentukan desa permasalahan-permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan hukum adat dapat diselesaikan secara adat, melalui mediasi tetua adat yaitu Bapa Raja. Meskipun sudah dalam proses hukum, raja-raja atau kepala desa dapat mengambil alih untuk diselesaikan dengan hukum adat.

Disini penulis mencoba mengambil salah satu contoh yaitu pada urusan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kokoda. Sebagaimana tradisi dimasyarakat Suku Kokoda, yaitu bagi kedua calon suami istri yang telah melangsungkan sebuah proses peminangan, kemudian kedua orang tua dari masing-masing pihak telah sama-sama menyetujui, dan telah sepakat mengenai ketentuan mahar tersebut, sejak itu pula kedua pasangan tersebut atau calon suami istri sudah dapat hidup selayaknya kehidupan rumah tangga, dan keduanya sudah dapat hidup satu rumah, wanita sudah boleh tinggal dirumah calon suaminya dan dapat berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri yang telah melaksanakan akad nikah sesuai syar'i, lebih dari itu keduanya telah melahirkan seorang anak.

Tradisi ini berawal dari sikap toleransi kekerabatan intern masyarakat dalam tradisi mereka sendiri yaitu adanya kepercayaan oleh pihak perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki sehingga perempuan tersebut sudah dapat diserahkan kepada pihak laki-laki untuk tinggal satu rumah. Namun hal demikian harus melewati beberapa tahapan dalam proses peminangan sesuai dengan ketentuan tradisi yang berlaku dimasyarakat Kokoda.

2) Pasca Pembentukan Desa

Setelah pembentukan kini banyak yang mulai menyadari bahwa pernikahan harus dilakukan bukan hanya sekedar melalui pernikahan yang dilakukan secara adat semata. Beberapa orang yang menikah, kini telah melangsungkan pernikahan secara sah baik secara adat, agama, ataupun negara.

Pernikahan yang sah secara agama dan negara akan menghadirkan sebuah keluarga yang terjamin hak-haknya secara sipil. Pernikahan yang hanya sah secara adat menyebabkan anak-anak mereka tidak memiliki akte kelahiran, sehingga dalam hal administrasi kedepannya mereka akan menemukan kesulitan-kesulitan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber 1 pada tanggal 25 Agustus 2019 :

“... kurang lebih sekrang sudah ada 10an masyarakat yang menikah lewat jalur KUA, bukan hanya nikah melalui adat, biar nanti anak-anak mereka gampang untuk urus akte kelahiran.”

3. Dimensi Interaksional

Dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Pada dimensi ini perubahan terjadi pada interaksi sosial masyarakat. Baik interaksi sosial antara masyarakat desa Warmon Kokoda sendiri maupun interaksi sosial masyarakat Warmon Kokoda dengan warga transmigran Jawa. Menurut Soekanto (1999: 60) Interaksi sosial merupakan suatu kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya.

a) Interaksi Antara Masyarakat Desa Warmon Kokoda

1) Pra Pembentukan Desa

Jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak pada saat sebelum terbentuk menjadi sebuah desa, pimpinan masyarakat dapat dengan mudah meminimalisir konflik-konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Apabila ada konflik yang terjadi di masyarakat, raja sebagai pimpinan masyarakat dapat dengan mudah memediasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jumlah masyarakat yang tidak terlalu banyak juga berpengaruh pada jumlah serta besar konflik yang terjadi.

Masyarakat pada waktu itu juga hidup secara bersama-sama dalam satu rumah, sehingga intensitas pertemuan antara satu orang dengan orang lainnya terjadi sangat sering. Hubungan satu orang dengan lainnya, atau satu keluarga dengan keluarga lainnya berjalan rukun tanpa ada kecemburuan sosial. Saling menjaga dan saling melindungi adalah sebuah kewajiban.

Kerja-kerja kolektif dan gotong royong seperti pembenahan atap rumah tetangga yang sudah rusak, menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus meminta imbalan. Informasi ini diperoleh dari hasil obrolan bersama narasumber 2 pada saat penulis KKN di lokasi :

“...dulu waktu kami masih tinggal di rumah panggung, kalo ada rumah tetangga yang rusak, kami kerja bakti untuk memperbaikinya sama-sama, tanpa imbalan.”

Aktifitas makan pinang, merokok, sambil membicarakan sesuatu biasa terjadi didalam rumah. Ludah pinang bisa dibuang pada celah-celah lantai rumah gaba-gaba, tidak perlu keluar rumah untuk membuang ludah pinang.

Ini menandakan adanya sebuah hubungan kekeluargaan dengan ikatan yang sangat kuat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

2) Pasca Pembentukan Desa

Semakin lama jumlah penduduk Warmon Kokoda semakin bertambah banyak. Bertambahnya jumlah penduduk ini bertampak pada kondusifitas masyarakat yang sudah lama menetap di desa. Ditambah masyarakat dari kota yang baru datang kerap membawa pengaruh buruk pada masyarakat, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat tak jarang kembali dilakukan.

Selain itu muncul juga konflik di bidang ekonomi dimana ketika ada ada sebuah proyek pembangunan di desa, masyarakat yang baru datang dari kota kerap dianggap sebagai perebut jatah untuk kerjaan masyarakat yang sudah lama menetap. Hal ini memicu kecemburuan sosial yang bermuara konflik horizontal antara individu satu dengan individu lainnya. Informasi ini berdasarkan obrolan bersama narasumber 3 yang mengamati perilaku masyarakat Warmon Kokoda:

“... kalo ada proyek dari dana desa, masyarakat dari kota banyak yang datang ke desa untuk ikut kerja. Sering sekali akhirnya baku mulut karena berebut jatah kerjaan untuk mendapatkan uang.”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan salah satu warga yang pada saat itu ikut serta dalam proyek pembangunan desa.

“... seharusnya kalau ada proyek macam begitu yang diutamakan itu orang-orang yang sudah lama tinggal di kampung, bukan orang-orang yang baru datang dari kota”.

Dari informasi tersebut menandakan bahwa semenjak adanya proyek-proyek pembangunan dari dana desa, muncul kecemburuan-kecemburuan sosial masyarakat yang dapat memicu konflik horizontal.

b) Interaksi Dengan Warga Transmigran Jawa

1) Pra Pembentukan Desa

Hampir dua puluh tahun masyarakat transmigran jawa dan masyarakat Desa Wamon Kokoda hidup berdampingan. Selama itu juga masyarakat kokoda telah belajar untuk memperbaiki hubungan-hubungan mereka dengan transmigran jawa, dengan tidak melakukan hal-hal yang memicu konflik.

Namun seiring berjalannya waktu konflik-konflik tersebut mulai mereda. Hubungan individu-individu diantara keduanya sudah mulai berjalan baik, namun tak mencakup seluruh masyarakat. Komunikasi diantaranya keduanya juga mulai berjalan cukup intens. Masyarakat Kokoda sudah mulai adaptif dalam hidup berdampingan bersama masyarakat transmigran. Hal ini merupakan hasil dari wawancara dengan warga transmigran yaitu Jono Suwarno :

“.... perlahan ya hubungan kami dengan masyarakat Kokoda mulai bagus, mereka sudah mengerti lingkungan sekitar, hanya saja beberapa masyarakat yang baru pindah dari kota ke desa yang kerap bikin rusuh.”

2) Pasca Pembentukan Desa

Pasca pembentukan desa, konflik antara masyarakat kokoda dengan warga transmigran kembali sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh

masyarakat kota yang baru pindah ke desa. Mereka yang biasa hidup di kota dan belum terbiasa berinteraksi, memandang sinis warga transmigran. Mereka juga membawa pengaruh buruk pada masyarakat kokoda yang sudah lama hidup berdampingan bersama warga transmigran. Hal ini penulis dapatkan dari narasumber 3 yang tinggal berdampingan langsung dengan masyarakat Kokoda :

“... anak-anak yang sudah lama dan bisa beradaptasi disini sekarang sifatnya kembali lagi seperti dulu. Kebun saya ada kasbi, kelapa, diambil sama mereka. Orang-orang Kokoda dari kota tiap datang pasti membawa pengaruh buruk sama masyarakat sini.”

Bahkan tak jarang masyarakat yang baru datang dari kota membuat rusuh di pemukiman warga transmigran. Merobek bendera umbul-umbul yang terpajang dipinggir jalan, melempari rumah warga transmigran dengan kerikil, tak jarang mereka buang hajat sembarangan di jalan, hingga mabuk-mabukan. Narasumber 3 juga menyampaikan hal tersebut dalam sela-sela obrolan :

“... itu mereka dulu pernah buang hajat sembarangan di jalan, melempari batu, dan kadang teriak-teriak tidak jelas.”

Stigma-stigma buruk pada masyarakat Kokoda pun kembali muncul, sebagai akibat dari pengaruh masyarakat Kokoda yang baru datang dari kota ke desa. Sehingga hubungan serta interaksi yang telah membaik diantara keduanya kembali sensitif lagi karena pengaruh dari masyarakat kota yang baru datang ke desa.

B. Analisis Hasil Temuan Lapangan

Dari hasil penelitian penulis mencoba untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Warmon Kokoda. Perubahan seperti apa saja sebelum dan pasca pembentukan desa pada masyarakat Desa Warmon Kokoda.

Berikut adalah hasil perbandingan kondisi perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pemekaran Desa :

Tabel 3.5

Kondisi Pra dan Pasca Pembentukan Desa

No	Indikator	Pra Pembentukan Desa	Pasca Pembentukan Desa
1	Dimensi Struktural	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat tidak memiliki mata pencaharian yang tetap b. Tingkat pendidikan dan motivasi belajar yang rendah c. Jumlah penduduk sekitar 256 jiwa dengan 158 KK d. Komunitas masyarakat adat yang menghuni suatu wilayah e. Masyarakat tidak memiliki struktur kelembagaan baik di bidang adat maupun pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian tetap. Diantaranya : nelayan, aparatur desa, tukang, dan penjaga warung. b. Tingkat pendidikan dan motivasi belajar meningkat. Ada sekitar 25-30 anak yang aktif ikut belajar mengajar di sekolah. Serta 10 orang yang kini menempuh pendidikan di Jawa. c. Masyarakat memiliki struktur kelembagaan, yaitu di bidang

		f. Status raja sebagai pimpinan dan peran raja-raja yang mendominasi	pemerintahan. d. Jumlah penduduk meningkat menjadi 600 jiwa dengan 180 KK e. Masyarakat yang secara hukum diakui sebagai desa f. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan masyarakat
2	Dimensi Kultural	a. Gaya hidup masyarakat yang komunal, dan bekerja secara kolektif b. Pola pikir masyarakat yang sangat bergantung pada alam c. Masyarakat yang menjunjung adat tapi kurang sadar akan hukum. Contoh dalam hal pernikahan.	a. Masyarakat semakin individualis b. Pola pikir masyarakat yang bergantung pada bantuan-bantuan sosial c. Beberapa masyarakat sudah melek mengenai hukum. Contoh: dalam hal pernikahan.
3	Dimensi Interaksional	a. Jarang muncul konflik-konflik yang timbul akibat kecemburuan sosial	a. Sering muncul konflik-konflik akibat kecemburuan sosial

		b. Masyarakat sudah bisa berinteraksi dengan baik dengan warga transmigran	b. Masyarakat mendapat stigma yang negatif kembali akibat masyarakat kota yang pindah ke desa
--	--	--	---

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Warmon Kokoda mengarah pada perubahan kearah yang positif. Namun tidak secara keseluruhan perubahan sosial tersebut mengarah ke perubahan yang positif, ada pula perubahan sosial yang mengarah pada perubahan kearah negatif.

Perubahan yang mengarah kearah yang positif dapat dilihat dari beberapa kondisi. Diantaranya adalah kondisi pendidikan masyarakat Desa Warmon Kokoda yang secara perlahan mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Pasca pembentukan desa, minat serta motivasi belajar anak-anak Warmon Kokoda meningkat, serta kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak pun mulai tumbuh. Meskipun perubahan ini tidak terjadi secara signifikan tetapi jika hal positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pendidikan masyarakat Warmon Kokoda semakin maju.

Kemudian dalam segi ekonomi, masyarakat Warmon Kokoda kini banyak yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Adanya program-program pemerintah yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat secara perlahan dapat mengurangi angka pengangguran pada masyarakat.

Selanjutnya dari segi pelayanan, kini masyarakat Warmon Kokoda telah mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Misalnya dalam pembuatan KTP, kini dipermudah karena adanya pemerintahan desa. Kini 70% dari masyarakat yang sudah dewasa telah memiliki KTP. Adanya KTP ini mempermudah masyarakat

untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga Indonesia, misalnya jaminan atas kesehatan.

Disisi lain ada juga sisi negatifnya, dimana sisi negatif ini bukan merupak efek langsung, tapi merupakan efek domino dari perubahan sosial tersebut. Pada sisi ini tak dapat dilihat bahwa ini merupakan hal yang mutlak negatif pada perubahan masyarakat. Sisi negatifnya adalah pasca pembentukan desa Warmon Kokoda mendapatkan banyak bantuan dari segala macam instansi. Salah satunya adalah bantuan perumahan layak huni dari Dinas Sosial Kabupaten Sorong. Tidak bisa ditelan mentah-mentah memang adanya perumahan baru berefek negatif pada keberlangsungan hidup masyarakat Warmon Kokoda. Adanya perumahan layak huni juga merupakan kebutuhan warga untukk hidup sehat, aman dan nyaman. Namun dilihat dari beberapa hal perumahan tersebut memiliki efek pada interaksi sosial sesama masyarakatnya.

Gaya hidup masyarakat pasca tinggal di rumah baru mengarah ke individualis, dimana pada sebelumnya mereka hidup secara komunal dan bekerja seara kolektif dalam satu rumah, kini mereka hidup sendiri-sendiri dalam satu rumah. Sehingga kerja-kerja kolektif jarang terjadi seperti dulu.

Kemudian, itu setelah disahkannya Warmon Kokoda sebagai desa, banyak masyarakat Suku Kokoda yang tinggal di kota berbondong-bondong pindah ke desa. Hal ini menyebabkan adanya konflik baru yang terjadi antar masyarakat, yaitu adanya kecemburuan sosial. Selain itu kedatangan masyarakat kokoda dari kota secara berbondong-bondong, juga menyebabkan interaksi antara

masyarakat kokoda dengan warga transmigran kembali memburuk. Hal ini disebabkan karena masyarakat kokoda yang baru datang kerap membuat hal-hal yang kurang mengenaikan bagi warga transmigran Jawa, misalnya mencuri, mabuk-mabukan, rusuh, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kota tersebut membawa pengaruh buruk pada masyarakat kokoda yang telah lama menetap di wilayah tersebut.